

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Giofano Johaness Sipota<sup>1</sup>, Een N. Walewangko<sup>2</sup>, Irawaty Masloman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia  
Email : [johanessipota@gmail.com](mailto:johanessipota@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengangguran serta mengurangi ketimpangan. Pembangunan ekonomi inklusif perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Pemerintah harus memiliki program komprehensif dan mengimplementasikannya secara serius sehingga pembangunan ekonomi tumbuh lebih tinggi dan lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan inklusif dan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pertumbuhan ekonomi dan data jumlah penduduk miskin dengan periode pengamatan 8 tahun yaitu tahun 2015-2022. Data diperoleh dari badan pusat statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Inclusive Growth Index* (IGI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah bersifat inklusif, meskipun pada tahun 2015-2017 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, tetapi pada tahun 2018-2021 secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah inklusif dalam menurunkan kemiskinan.

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Ekonomi; *Inclusive Growth Index*; PDRB; Kemiskinan

### ABSTRACT

*Inclusive economic growth is growth that involves all levels of society without differences in background to increase economic growth, reduce poverty, unemployment and reduce inequality. Inclusive economic development needs to be carried out to support high and sustainable economic growth. The government must have a comprehensive program and implement it seriously so that economic development grows higher and more inclusive. This study aims to determine inclusive growth and poverty in Talaud Islands District. This study uses secondary data in the form of economic growth data and data on the number of poor people with an observation period of 8 years, namely 2015-2022. Data was obtained from the central statistics agency of Talaud Islands District. The data analysis method used in this study is the Inclusive Growth Index (IGI). The results showed that economic growth in Kepulauan Talaud Regency has been inclusive, although in 2015-2017 economic growth in Talaud Islands Regency has not been inclusive in reducing poverty, but in 2018-2021 successively economic growth in Kepulauan Talaud Regency has been inclusive in reducing poverty.*

**Keywords :** *Inclusive Growth Index; Economic Growth; GRDP; Poverty*

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik, umumnya pertumbuhan ekonomi identik dengan proses kenaikan kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila produk domestik regional bruto mengalami kenaikan. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah *framework* utama dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu negara dapat diukur dari kemampuan negara tersebut dalam menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta menekan kesenjangan yang ada. Disisi lain, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan menjamin seseorang akan memperoleh keistimewaan yang sama. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dapat menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan dan juga berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi (Pratama, 2020). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh

indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi kemiskinan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengangguran serta mengurangi ketimpangan. Pembangunan ekonomi inklusif perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Pemerintah harus memiliki program komprehensif dan mengimplementasikannya secara serius sehingga pembangunan ekonomi tumbuh lebih tinggi dan lebih inklusif. Menurut Prasetyantoko et al. (2012) pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu, peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat.

Konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Mengacu pada dua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak mendiskriminasi dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan atau mengurangi disparitas antar kelompok (Hapsari et al., 2013).

**Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara  
Tahun 2015-2022 (Persen)**

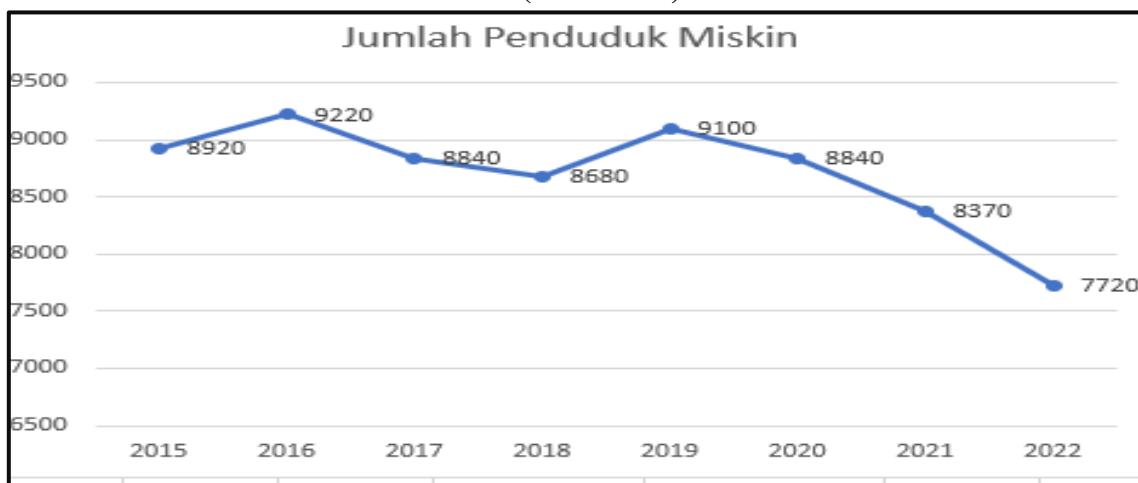
Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi/Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bolaang Mongondow	5,89	6,56	6,67	7,49	7,89	0,98	3,87	5,35
Minahasa	6,17	6,06	6,07	6,10	5,79	-1,02	3,96	5,47
Kepulauan Sangihe	6,07	6,08	5,45	5,50	5,42	0,47	5,98	5,45
Kepulauan Talaud	5,23	5,28	5,10	5,02	4,69	0,43	3,34	5,22
Minahasa Selatan	6,30	5,09	6,53	6,09	5,97	-0,77	4,91	5,41
Minahasa Utara	7,03	7,05	6,51	6,41	6,35	-0,9	5,36	5,50
Bolaang Mongondow Utara	5,80	6,16	6,28	6,18	6,17	0,71	3,46	5,52
Kep. Siau, Tagulandang, Biaro	7,01	7,00	6,99	6,73	6,65	1,03	4,43	5,19
Minahasa Tenggara	6,29	6,32	6,36	6,00	5,98	-0,64	4,29	5,30
Bolaang Mongondow Selatan	5,96	6,13	6,24	6,56	6,39	0,63	3,74	5,20
Bolaang Mongondow Timur	6,48	5,57	5,71	5,06	4,80	0,16	3,05	5,18
Kota Manado	6,39	7,18	6,74	6,65	6,05	-3,16	5,15	5,64
Kota Bitung	3,54	5,21	6,18	6,01	4,06	1,37	4,60	5,61
Kota Tomohon	6,03	4,19	8,84	6,12	6,76	-0,41	1,95	5,17
Kota Kotamobagu	6,52	6,63	6,79	6,66	6,13	0,19	4,22	5,15
Sulawesi Utara	6,12	6,16	6,31	6,00	5,65	-0,99	4,16	5,42

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi dari tahun 2015-2022 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya bahkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara mengalami kontraksi sehingga mencapai angka negatif 0.99. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tak terkecuali Kabupaten Kepulauan Talaud. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud paling tinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 5.28 persen dan paling rendah terdapat pada tahun 2020 yaitu 0.43 persen. Dengan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015-2021, kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud sudah tergolong pertumbuhan ekonomi inklusif atau belum inklusif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud menggambarkan keadaan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tidak stabil karena selalu berfluktuasi. Untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan dan pembangunan pada ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud haruslah juga seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat ini meliputi juga pengurangan penduduk miskin, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan daerah dan lainnya. Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan ini juga merupakan masalah kompleks yang di hadapi dari generasi ke generasi. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dilihat dari jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga timbulah kesenjangan (Fadila dan Marwan, 2020).

**Gambar 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015-2022 (Ribu Jiwa)**



Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2015-2022 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 9220 ribu jiwa dan paling rendah terdapat pada tahun 2022 yaitu 7720 ribu jiwa. Apakah dengan terjadinya fluktuasi pada tingkat kemiskinan maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat digolongkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau belum inklusif.

Perhatian utama tentang kemiskinan secara eksplisit dijelaskan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana tujuan pertamanya adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan tertera pada tujuan kedelapan. Pertumbuhan inklusif dapat dijadikan sebagai acuan apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat

dikatakan berkualitas atau tidak. Pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin bahwa keuntungan didistribusikan secara adil atau kelompok yang sangat miskin dan terpinggirkan akan mendapat manfaat yang sama (Nurainun., 2021).

Menurut *Asian Development Bank* (2011), ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu: pertama, pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Kedua, pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak tidak diharapkan. Ketiga, ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan (Pratama, 2020).

Topik ini menarik untuk diteliti karena penting untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah tergolong dalam pertumbuhan inklusif yang dapat menurunkan kemiskinan atau tidak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk pengambilan kebijakan terlebih untuk kebijakan yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan inklusif yang dapat menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sejalan dengan permasalahan ini, maka dalam penulisan ini, dilakukan penghitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai *Inclusive Growth Index* (IGI). Melalui indeks ini, dapat diketahui kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai suatu evaluasi keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dalam Penurunan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pertumbuhan inklusif dan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang besar merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Samuelson dan William (1992) pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan GNP yang bersumber dari adanya pertumbuhan dalam tenaga kerja, pertumbuhan dalam modal dan pertumbuhan inovasi dan teknologi (Murni, 2016). Menurut Prawoto (2019) pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi jangka panjang, hal ini menyangkut tentang kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam dan proses terjadinya output sehingga menjadi pendapatan bagi masyarakat. Proses yang terjadi dalam aktivitas ekonomi akan berlangsung secara terus-menerus. Proses tersebut akan menghasilkan pertambahan pada jumlah dan produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Pengukuran tersebut akan sangat sukar ditentukan untuk menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Oleh karena itu, dalam analisis makroekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dengan perkembangan atau penambahan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi dua aspek besar, yaitu pertumbuhan output (GDP) dan pertumbuhan penduduk. Konsep Smith dalam pertumbuhan output (GDP) terdiri dari unsur pokok, yaitu sumber daya alam yang tersedia pada suatu negara, sumber daya manusia dan stok kapital. Menurut Smith bahwa sumber daya alam merupakan faktor yang sangat mendasar dari kegiatan produksi, sehingga dua unsur lain yaitu sumber daya manusia dan stok kapital yang dapat menentukan besarnya output masyarakat dari waktu ke waktu (Prawoto, 2019). Menurut Murni (2016) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil

di negara tersebut. Tujuan pertumbuhan ekonomi tak lain adalah untuk meningkatkan GNP. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produk barang dan jasanya meningkat atau dengan kata lain terjadi perkembangan GNP potensial suatu negara. Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

## 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menurut Ali dan Zhuang (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan ekonomi inklusif erat kaitannya dengan pertumbuhan *pro-poor* dimana keduanya bermaksud menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan inklusif memiliki dimensi yang berbeda dalam hal kesetaraan pendapatan (Ranieri dan Almeida Ramos, 2013). *Pro-poor* lebih berfokus pada orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan pertumbuhan inklusif berfokus pada penyetaraan di semua lapisan masyarakat, baik miskin, menengah, dan kaya. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan yang hanya berpihak pada kaum miskin akan berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengutamakan kesetaraan antar tingkat masyarakat guna memperluas peluang ekonomi baru (McKinley, 2010). Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori-teori pertumbuhan (Huang dan Quibria, 2013). Hal tersebut sesuai dengan definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua pihak. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif bukan hanya mengejar tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

## 2.3 Kemiskinan

Menurut Devi (2009) kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti mampu bekerja atau berusaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, air minum dan lain sebagainya. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak ada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu, untuk mendefinisikan kemiskinan itu tidaklah mudah. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berbeda dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Menurut Chambers (1983) kemiskinan sangat tergantung pada siapa yang bertanya, bagaimana hal itu dipahami serta siapa yang meresponnya. Perspektif ini mengelompokkan makna kemiskinan menjadi beberapa kelompok dan beberapa diantaranya : kelompok pertama, yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan (*income-poverty*), kelompok kedua, yang memaknai kemiskinan dari kekurangan materi dan kelompok ketiga, mengacu pada pendapatan (Kotambunan, 2016).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Asnawi et al. (2022) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi Inklusif terhadap dengan kemiskinan, pengangguran dan Gini ratio di

Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan *gini ratio*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diteliti meliputi Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan *Gini Rasio*, PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu tahun 2015 – tahun 2021 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan inklusif growth index (IGI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 bersifat belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, pengangguran dan *gini ratio*, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non inklusif terhadap kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2020) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, *gini ratio*, PDRB, Kemiskinan, Ketimpangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi tahun 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan Indeks Growth Inclusive (IGI) untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Growth Inclusive (IGI) Provinsi Jambi sebesar 2,96 dan termasuk pada kategori belum memuaskan (nilai indeks: < 4). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pengurangan ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut tentu saja belum sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam prosesnya dan dapat menikmati hasilnya.

Penelitian yang dilakukan Shaleh (2021) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, kualitatif deskriptif dan indeks growth inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata indeks growth inklusif di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 3.52 dan termasuk pada kategori belum memuaskan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan tetapi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat juga tinggi. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh semua masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Hartati (2021) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, data yang diteliti meliputi data pertumbuhan ekonomi inklusif, data pengeluaran pemerintah dan data tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2010-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui impikasi kebijakan pemerintah yaitu penguatan Program

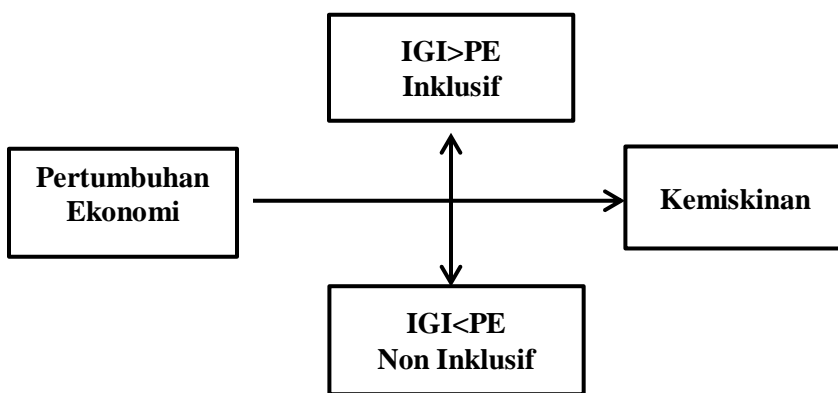
Indonesia Pintar (PIP), hingga pendidikan vokasi, penguatan program kesehatan melalui penambahan fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, hingga memaksimalkan kartu Indonesia sehat dan BPJS.

Penelitian yang dilakukan Afriliana dan Wahyudi (2022) yang menganalisis pertumbuhan ekonomi inklusif: studi komparasi antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan inklusif di 34 Provinsi Indonesia beserta faktor – faktor yang dapat mendukung pertumbuhan inklusif cepat berkembang di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPJK) yang berkisar tahun 2014 hingga 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) dan menggunakan model estimasi data panel dinamis menggunakan *Generalize Methode of Moment Arellano Bond* (GMM – AB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif. Pada penelitian ini pendapatan perkapita, anggaran belanja pendidikan, anggaran belanja kesehatan, dan FDI memiliki pengaruh terhadap munculnya pertumbuhan inklusif di Indonesia. Sedangkan DDI merupakan variabel yang tidak mendukung munculnya pertumbuhan inklusif di Indonesia.

**2.5 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan teori yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2 Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Kajian diolah Penulis*

Berdasarkan kerangka pmikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Jika *Inclusive Growth Index* lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud bersifat Non Inklusif dalam menurunkan kemiskinan.

**3 METODE PENELITIAN**

**Data Dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, catatan dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan periode pengamatan tahun 2015-2022 (8 tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto dan lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2015-2022.

## Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang diukur dengan satuan persen.
2. Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang diukur dengan satuan ribuan jiwa per tahun.

## Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi inklusif dan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan menggunakan *Inclusive Growth Index* (IGI) yang kemudian akan diolah menggunakan *Microsoft Excel*. Adapun rumus untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan adalah sebagai berikut :

Rumus Gp (Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata)

$$\text{Elastisitas PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PO_t - PO_{t-1}} \times \frac{PDRB}{PO}$$

Rumus Gpg (Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi)

$$\text{Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PE_t - PE_{t-1}}{PO_t - PO_{t-1}} \times \frac{PO}{PE}$$

Rumus IGpov (Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan )

$$\text{IGpov} = (\text{Gpg}/\text{Gp}) \widehat{\text{Gg}}$$

Dimana :

IGpov = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

Gp = Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

Gpg = Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

$\widehat{\text{Gg}}$  = Pertumbuhan Ekonomi

IGpov menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai IGpov >  $\widehat{\text{Gg}}$ . Jika IGpov <  $\widehat{\text{Gg}}$  berarti pertumbuhan tidak bersifat inklusif.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian.

Jika dianalisis menggunakan *inclusive growth index*, maka hasil yang diperoleh seperti tabel di bawah ini:



**Tabel 2. Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.**

Tahun	PE (%)	PDRB ADHK (Rp)	P0 (Rp)	Gpg (%)	Gp (%)	IGpov (%)	IGgr
2015	5,23	1.319.041,50	8.920	1,57	0,28	0,96	Non Inklusif
2016	5,28	1.388.746,40	9.220	1,24	0,83	3,41	Non Inklusif
2017	5,1	1.459.636,20	8.840	2,77	0,87	1,57	Non Inklusif
2018	5,02	1.532.887,46	8.680	0,97	1,36	6,57	Inklusif
2019	4,69	1.604.807,96	9.100	0,15	31,79	90,40	Inklusif
2020	0,43	1.611.741,55	8.840	0,63	127,29	676,43	Inklusif
2021	3,34	1.665.598,48	8.370	2,53	7,25	14,97	Inklusif

*Sumber : Olahan data Microsoft Excel*

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa pada beberapa periode penelitian, nilai koefisien pertumbuhan inklusif di Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kondisi pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan masih belum inklusif, jadi kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Berbeda dengan tahun 2018,2019,2020 dan 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah inklusif atau sudah sejalan dengan teori. Dimana pada tahun – tahun tersebut terdapat beberapa program pemerintah pusat yang menopang program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sampai 40%, yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan rumah layak huni melalui dinas sosial mulai dari tahun 2016, Beras untuk orang miskin (raskin), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program bantuan sembako yaitu pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada keluarga miskin sebesar Rp. 110.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) setiap penerima manfaat akan menerima kartu keluarga sejahtera yang dapat ditukar dengan bahan pangan seperti beras dan telur, Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Program berbasis keluarga yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH). Tahun 2019 dan 2020 dimasukkan dalam bias analisis karena masa Pandemi Covid 19.

#### 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pertumbuhan inklusif (*inclusive growth indes*), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah bersifat inklusif dari tahun 2018-2021. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif agat dapat menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, Berdasarkan teori *trickle down effect* bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menetes dari atas ke bawah, atau dalam arti tingkat kenaikan pendapatan rill akan mengalir dari kelompok golongan kaya ke kelompok golongan miskin. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermanfaat, apabila pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Negara maju tingkat pertumbuhan ekonomi lebih terdistribusi secara merata, sehingga tingkat kemiskinan lebih sedikit bila dibandingkan dengan negara berkembang. Bagaimana pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi akan menaikkan permintaan terhadap output, menaikkan kapasitas produksi para pekerja dan membuka lapangan kerja baru. Semua akan bermuara pada peningkatan pendapatan para pekerja. Pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pengeluaran, seperti pengeluaran terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian (pengurangan kemiskinan). Kondisi ini menciptakan kemungkinan kenaikan lebih lanjut dalam produktivitas dan tingkat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw dan Gregory (2006) dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Menurut Siregar dan Rajan (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan *necessary condition* (syarat keharusan) bagi pengentasan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Secara langsung, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja baik seperti di sektor pertanian maupun sektor-sektor padat karya yang pada umumnya banyak digeluti oleh masyarakat berpendapatan menengah kebawah. Adapun secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah diperlukan dalam redistribusi manfaat pertumbuhan yang diperoleh dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Pertumbuhan inklusif sering di maknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses oleh semua (Ali dan Zhuang, 2007). Pendekatan pertumbuhan yang inklusif mengambil perspektif jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif seharusnya bersifat inheren, berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya.

Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial (*social safety nets*). Oleh karena itu pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud hendaknya selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara yaitu adanya kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkualitas yang ditetapkan pemerintah, peningkatan kualitas dan potensi deri masyarakat seperti pelatihan wirausaha atau pelatihan softskill yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat meningkat, penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang dapat di jangkau oleh semua lapisan masyarakat agar dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat terus tumbuh dan pertumbuhan ekonomi dapat inklusif dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shaleh (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menunjukkan Pertumbuhan inklusif Sulawesi Selatan sudah termasuk kedalam kategori memuaskan dengan capaian Indeks 6,00 namun masih pada level menengah dengan menempati posisi ke 15 dari 34 Provinsi Se-Indonesia.

## 5 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian , maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2015-2021 bersifat inklusif dalam

menurunkan kemiskinan, ini di tandai dengan pertumbuhan inklusif secara berturut-turut dari tahun 2018-2021. Meskipun masih adanya pertumbuhan yang bersifat non inklusif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu tahun 2015-2017, tetapi setelah tahun tersebut pertumbuhan ekonomi sudah inklusif dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriliana, S. N., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(1).
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications (No. 97)*. ERD working paper series.
- Arfiani Devi. (2009). *Berantas Kemiskinan*. Alprin.
- Asnawi, E. G., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kota Kotamobagu. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 23(3), 19-35.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Edisi Pertama)*. BPFE.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development, Putting the Last First*, Longman.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120-133.
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan inklusif: Fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85-112.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79-92.
- Huang, Y., & Quibria, M. G. (2013). *The global partnership for inclusive growth (No. 2013/059)*. WIDER Working Paper.
- Kotambunan, L. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Mankiw, N., & Gregory. (2006). *Teori Ekonomi Makro*. Erlangga.
- McKinley, T. (2010). *Inklusif Growth Criteria and Indicators: an Inklusif Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 14*. Asian Development Bank.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro*. Refika Aditama.
- Nurainun., W. (2021). *Analisis Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.

- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. LP3ES : Prakarsa.
- PRATAMA, A. R. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jambi Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1–61.
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Rajawali Pers.
- Ranieri, R., & Almeida Ramos, R. (2013). *Inclusive growth: Building up a concept* (No. 104).
- Samuelson, P. A., & William, D. N. (1992). *Samuelson, Paul.A., dan William D.Nordhaus., (1992), Makroekonomi* (Edisi 4,). Erlangga.
- Shaleh, M. M. (2021a). Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).
- Shaleh, M. M. (2021b). Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1).
- Siregar, & Rajan, R. (2006). *Models of equilibrium real exchange rates revisited: A selective review of the literature*. University of Adelaide.
- Todaro, & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga.